

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam analisis merupakan hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang berada di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan sebanyak 100 kuesioner. Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 11 kuesioner, sehingga yang dapat digunakan untuk analisis data sebanyak 89 kuesioner yang merupakan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuesioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Prosentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	100	100
Jumlah kuesioner yang dikumpulkan	100	100
Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap atau rusak	11	9,79
Total kuesioner yang dapat diolah	89	90,21

Sumber: Data diolah

- **Identitas Responden**

Identitas responden dalam penelitian ini dibagi berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki, usia Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki, pendidikan terakhir Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki dan pendapatan per tahun Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki.

1. Jenis Kelamin Wajib Pajak yang Memiliki NPWP maupun yang tidak Memiliki NPWP

Tabel yang menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel4.2
Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Wajib pajak yang memiliki NPWP

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	21	42,86
2	Perempuan	28	57,14
	Jumlah	49	100

Sumber: Data diolah

Tabel4.3
Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Wajib Pajak yang tidak Memiliki NPWP

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Laki-laki	27	67,5
2	Perempuan	13	32,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak memiliki NPWP adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 28 responden atau sebesar 57,14%. Responden laki-laki yang memiliki NPWP sebanyak 21 responden atau sebesar 42,86%. Responden yang paling banyak tidak memiliki NPWP adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 67,5%. Responden perempuan yang tidak memiliki NPWP yaitu sebanyak 13 atau 32,5%.

2. Usia Wajib Pajak yang Memiliki NPWP maupun tidak Memiliki NPWP

Tabel yang menunjukkan distribusi responden berdasarkan usia Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Responden berdasarkan Usia Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

No	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	<= 25	6	11,76
2	26 – 30	9	17,65
3	31 – 35	14	27,45
4	36 – 40	8	15,69
5	> 40	14	27,45
	Jumlah	51	100

Sumber: Data diolah

Tabel 4.5
Distribusi Responden berdasarkan Usia Wajib Pajak yang tidak Memiliki NPWP

No	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	<= 25	3	7,9
2	26 – 30	8	21,05
3	31 – 35	8	21,05
4	36 – 40	14	36,84
5	> 40	5	13,16
	Jumlah	38	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada semua interval usia responden yang telah memiliki NPWP lebih besar daripada yang tidak memiliki NPWP. Pada tabel 4.4, usia responden yang paling banyak memiliki NPWP yaitu responden yang berusia 31 – 35 tahun dan lebih dari 40

tahun yang berjumlah 14 responden atau sebanyak 27,45%. Berikutnya

responden yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah 9 responden atau sebanyak 17,65%. Pada urutan ketiga yaitu responden yang berusia 36 – 40 tahun berjumlah 8 responden atau sebanyak 15,69 %. Responden yang paling sedikit memiliki NPWP yaitu responden yang berusia kurang dari atau sama dengan 25 tahun berjumlah 6 responden atau sebanyak 11,76%.

Pada tabel 4.5 responden yang paling banyak tidak memiliki NPWP yaitu responden yang berusia 36 – 40 tahun berjumlah 14 responden atau sebanyak 36,84%.Berikutnya responden yang berusia 26 – 30 tahun dan 31 – 35 tahun yang berjumlah 8 responden atau sebanyak 21,05%. Pada urutan ketiga yaitu responden yang berusia lebih dari 40 tahu berjumlah 5 responden atau sebanyak 13,16%. Selanjutnya, responden yang paling sedikit tidak memiliki NPWP yaitu usia kurang dari atau sama dengan 25 tahun berjumlah 3 responden atau 7,9%.

3. Pendidikan Wajib Pajak yang Memiliki NPWP maupun yang tidak Memiliki NPWP

Tabel yang menunjukkan distribusi responden berdasarkan pendidikan Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki

Tabel 4.6
Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMA	13	25
4	D1 - D3	17	32,69
5	S1	22	42,31
6	S2	0	0
	Jumlah	52	100

Sumber: Data diolah

Tabel 4.7
Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak yang tidak Memiliki NPWP

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SMA	27	72,97
4	D1 - D3	6	16,22
5	S1	4	10,81
6	S2	0	0
	Jumlah	37	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas responden yang telah memiliki NPWP lebih besar terjadi pada lulusan Sarjana dan responden yang tidak memiliki NPWP lebih besar terjadi pada lulusan SMA. Pada tabel 4.6, responden yang paling banyak memiliki NPWP yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu berjumlah 22 responden atau sebanyak 42,31%. Urutan kedua yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan D1 – D3 yaitu berjumlah 17 responden atau sebanyak 32,69%. Pada urutan ketiga yaitu

responden yang paling sedikit memiliki NPWP yaitu responden yang

memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu berjumlah 13 responden atau sebanyak 25%.

Pada tabel 4.7 responden yang paling banyak tidak memiliki NPWP yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu berjumlah 27 responden atau sebanyak 72,97%. Berikutnya, pada urutan kedua yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan D1 – D3 yaitu berjumlah 6 responden atau sebanyak 16,22%. Pada urutan terakhir, responden yang paling sedikit tidak memiliki NPWP yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu berjumlah 4 responden atau 10,81%.

4. Pendapatan Wajib Pajak yang Memiliki NPWP maupun tidak Memiliki NPWP

Tabel yang menunjukkan distribusi responden berdasarkan pendidikan Wajib Pajak yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Responden berdasarkan Pendapatan Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

No	Pendapatan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	< 100 Juta	1	1,96
2	110 Juta - 300 Juta	20	39,22
3	310 Juta - 600 Juta	12	23,53
4	610 Juta - 800 Juta	10	19,61
5	810 Juta - 1 M	2	3,92
6	1 M - 2 M	4	7,84
7	> 2 M	2	3,92
	Jumlah	51	100

Tabel 4.9
Distribusi Responden berdasarkan Pendapatan Wajib Pajak yang tidak Memiliki NPWP

No	Pendapatan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	< 100 Juta	28	73,68
2	110 Juta - 300 Juta	9	23,68
3	310 Juta - 600 Juta	1	2,64
4	610 Juta - 800 Juta	0	0
5	810 Juta - 1 M	0	0
6	1 M - 2 M	0	0
7	> 2 M	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas responden yang paling banyak memiliki NPWP yaitu responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 110 juta – 300 juta, sedangkan responden yang tidak memiliki NPWP didominasi oleh responden yang memiliki pendapatan per tahun kurang dari 100 juta. Pada tabel 4.8, dapat dibuktikan bahwa responden yang memiliki NPWP mulai dari responden yang memiliki pendapatan per tahun kurang dari 100 yaitu berjumlah 1 responden atau sebanyak 1,96%. Kemudian responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 110 juta – 300 juta yaitu berjumlah 20 responden atau sebanyak 39,22%. Responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 310 juta – 600 juta berjumlah 12 responden atau sebanyak 23,53%. Berikutnya, responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 610 juta – 800 juta dan lebih dari 2 M masing-masing berjumlah 2 responden atau sebanyak 3,92%. Responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 1M – 2M berjumlah 4 responden atau

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak tidak memiliki NPWP yaitu responden yang memiliki pendapatan per tahun kurang dari 100 juta yang berjumlah 28 responden atau sebanyak 73,68%. Selanjutnya pada urutan kedua yaitu responden yang memiliki pendapatan per tahun mulai dari 110 juta – 300 juta yaitu berjumlah 9 responden atau sebanyak 23,68%. Responden yang memiliki pendapatan mulai dari 310 juta – 600 juta berjumlah 1 atau sebanyak 2,64%. Dapat diketahui bahwa pedagang di Pasar Beringharjo di dominasi oleh pedagang mikro yang pendapatan per tahunnya berkisar mulai 100 juta – 300 juta dan sudah memiliki NPWP.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menyajikan nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan standar deviasi jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebutuhan	89	11,00	25,00	17,88	3,162
Kemudahan	89	11,00	25,00	17,99	3,002
Sanksi	89	10,00	25,00	15,82	1,992
Persepsi fiskus	89	12,00	25,00	17,91	3,446
Persepsi manfaat	89	7,00	25,00	16,81	4,547
Kesadaran	89	14,00	25,00	19,74	2,516
Keinginan	89	11,00	25,00	18,13	3,245
Valid N (listwise)	89				

Tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) berjumlah 89 responden. Nilai minimum variabel kebutuhan atas NPWP sebesar 11,00 dan nilai maksimum kebutuhan atas NPWP sebesar 25,00. Rata-rata nilai kebutuhan atas NPWP sebesar 17,88 dengan standar deviasi sebesar 3,162. Nilai minimum variabel kemudahan dalam perpajakan sebesar 11,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Rata-rata nilai kemudahan dalam perpajakan sebesar 17,99 dengan standar deviasi sebesar 3,002. Nilai minimum variabel sanksi pajak sebesar 10,00 dan nilai maksimum sanksi pajak sebesar 10,00. Rata-rata nilai sanksi pajak sebesar 15,82 dengan standar deviasi sebesar 1,992.

Variabel persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus mempunyai nilai minimum 12,00 dan persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus mempunyai nilai maksimum sebesar 25,00. Rata-rata nilai variabel persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus sebesar 17,91 dengan standar deviasi sebesar 3,446. Nilai minimum variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak sebesar 7,00 dan nilai maksimum variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak sebesar 25,00. Rata-rata nilai variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak sebesar 16,81 dengan standar deviasi sebesar 4,547.

Nilai minimum variabel kesadaran membayar pajak sebesar 14,00 dan nilai maksimum variabel kesadaran membayar pajak sebesar 25,00. Rata-rata nilai variabel kesadaran membayar pajak sebesar 19,74 dengan standar deviasi sebesar 2,516. Nilai minimum variabel keinginan memiliki NPWP sebesar 11,00 dan nilai

keinginan memiliki NPWP sebesar 25,00. Rata-rata nilai

variabel kesadaran membayar pajak sebesar 18,13 dengan standar deviasi sebesar 3,245.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut.

Hasil analisis dapat diperoleh dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah sampel. Uji validitas menggunakan tabel t dan r *product moment* dengan signifikansi 5%. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	R Hitung	Keterangan
Kebutuhan atas NPWP	KB 1	0,497	Valid
	KB 2	0,661	Valid
	KB 3	0,585	Valid
	KB 4	0,606	Valid
	KB5	0,525	Valid
Kemudahan dalam Perpajakan	KM 1	0,602	Valid
	KM 2	0,575	Valid
	KM3	0,287	Valid
	KM 4	0,594	Valid
	KM 5	0,525	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0,345	Valid
	SP 2	0,433	Valid
	SP 3	0,599	Valid
	SP 4	0,322	Valid
Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus	PF 1	0,642	Valid
	PF 2	0,753	Valid
	PF 3	0,706	Valid
	PF 4	0,684	Valid
	PF 5	0,454	Valid
Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak	PM 1	0,685	Valid
	PM 2	0,774	Valid
	PM 3	0,726	Valid
	PM 4	0,620	Valid
	PM 5	0,766	Valid
Kesadaran Membayar Pajak	KS 1	0,390	Valid
	KS 2	0,437	Valid
	KS 3	0,619	Valid
	KS 4	0,618	Valid
	KS 5	0,528	Valid
Keinginan untuk Memiliki NPWP	KI 1	0,685	Valid
	KI 2	0,505	Valid
	KI 3	0,612	Valid
	KI 4	0,709	Valid
	KI 5	0,727	Valid

Pada penelitian ini, r_{tabel} menunjukkan angka 0,2084. Suatu data dapat dikatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dari data di atas, dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,2084), sehingga dapat dinyatakan valid. Dalam hal ini, berarti bahwa butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat digunakan dan mampu mewakili variabel yang diteliti.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil analisis dapat diperoleh dari nilai *cronbach alpha* seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kebutuhan atas NPWP	0,793	Reliabel
Kemudahan dalam Perpajakan	0,746	Reliabel
Sanksi Pajak	0,622	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus	0,842	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak	0,879	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0,734	Reliabel
Keinginan Memiliki NPWP	0,838	Reliabel

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis data seperti pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa data reliabel. Variabel kebutuhan atas NPWP menunjukkan nilai

Cronbach alpha 0,793, kemudahan dalam perpajakan menunjukkan nilai

cronbach alpha 0,746, sanksi pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0,622, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0,842, persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0,879, kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0,734 dan keinginan untuk memiliki NPWP menunjukkan nilai *cronbach alpha* 0,838. Semua variabel pada tabel menunjukkan nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel handal atau reliabel.

D. Uji Asumsi Klasik

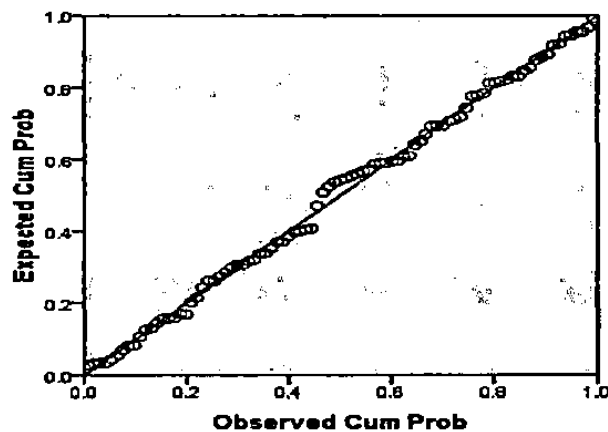
1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk memenuhi asumsi data yang berdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonalnya. Data yang berdistribusi normal yaitu dapat diketahui dengan melihat grafik yang penyebarannya mengikuti sumbu diagonalnya. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh grafik seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: keinginan memiliki npwp (k1+k2+k3+k4+k5)



Sumber: Data diolah

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan dalam diagonal di atas, dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti sumbu diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas data dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Suatu model regresi dapat dinyatakan bebas multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 10%. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	Nilai Tolerance	Keterangan
Kebutuhan atas NPWP	1,544	0,648	Bebas
Kemudahan dalam Perpajakan	1,928	0,519	Bebas
Sanksi Pajak	1,119	0,894	Bebas
Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus	2,242	0,446	Bebas
Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak	2,048	0,448	Bebas
Kesadaran Membayar Pajak	1,379	0,725	Bebas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai *tolerance* variabel kebutuhan atas NPWP sebesar 0,684, variabel kemudahan dalam perpajakan sebesar 0,519, variabel sanksi pajak sebesar 0,894, variabel persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,446, variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak sebesar 0,448 dan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,725. Semua nilai *tolerance* dari masing-masing variabel tersebut lebih dari 10% atau 0,10.

Nilai VIF variabel kebutuhan atas NPWP sebesar 1,544, variabel kemudahan dalam perpajakan sebesar 1,928, variabel sanksi pajak sebesar 1,119, variabel persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus sebesar 2,242, variabel persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak sebesar 2,048 dan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 1,379. Semua nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut kurang dari 10. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari besar dari 10% atau 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut kurang dari angka

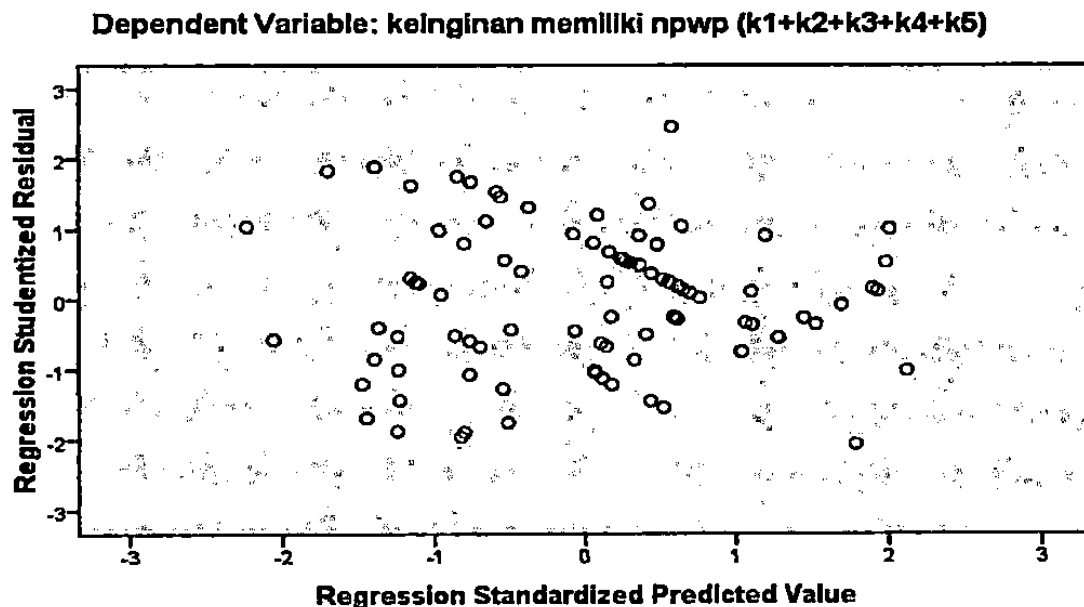
10, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel di atas tidak terjadi multikolinearitas atau model korelasi tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Suatu penelitian yang baik adalah apabila dalam model penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber: Data diolah

Dari hasil analisis data yang dilakukan, terlihat bahwa tidak ada pola

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel kebutuhan atas NPWP, kemudahan dalam perpajakan, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus, persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil analisis yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.328	2.933		-.453	.652
Kebutuhan Memiliki NPWP	.434	.096	.423	4.539	.000
Kemudahan Dalam Perpajakan	.154	.112	.142	1.368	.175
Sanksi Pajak	.165	.131	.100	1.266	.209
Persepsi Pelayanan	.252	.106	.267	2.382	.020
Persepsi Manfaat Pajak	-.005	.077	-.007	-.062	.951
Kesadaran Membayar Pajak	.097	.113	.075	.854	.395

a. Dependent Variable: Keinginan Memiliki NPWP

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh persamaan regresi

$$Y = - 1,328 + 0,434X_1 + 0,154X_2 + 0,165X_3 + 0,252X_4 - 0,05X_5 + 0,97X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Keinginan untuk Memiliki NPWP

X₁ = Kebutuhan atas NPWP

X₂ = Kemudahan dalam Perpajakan

X₃ = Sanksi Pajak

X₄ = Persepsi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus

X₅ = Persepsi Wajib Pajak terhadap Manfaat Pajak

X₆ = Kesadaran Membayar Pajak

e = error

2. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien positif sebesar 0,434 dan nilai sig sebesar 0,000, sehingga $\text{sig} (0,000) > \alpha (0,005)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kebutuhan atas NPWP berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP diterima.

3. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien positif sebesar 0,154 dan nilai sig sebesar 0,175, sehingga $\text{sig} (0,175) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kemudahan dalam perpajakan berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP

4. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien positif sebesar 0,165 dan nilai sig sebesar 0,209, sehingga $\text{sig } (0,209) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP tidak diterima.

5. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien positif sebesar 0,252 dan nilai sig sebesar 0,020, sehingga $\text{sig } (0,020) < \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP diterima.

6. Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien negatif sebesar 0,005 dan nilai sig sebesar 0,951, sehingga $\text{sig } (0,951) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP tidak diterima.

7. Pengujian Hipotesis 6

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien positif sebesar 0,097 dan nilai sig sebesar 0,395, sehingga $\text{sig } (0,395) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan kesadaran membayar

tidak berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP tidak

8. Uji Nilai F

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdiri dari kebutuhan atas NPWP, kemudahan dalam perpajakan, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus, persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak dan kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil uji nilai F yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Nilai F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	500.053	6	83.342	16.030	.000 ^a
Residual	426.329	82	5.199		
Total	926.382	88			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Dalam Perpajakan, Kebutuhan Memiliki NPWP, Persepsi Manfaat Pajak, Persepsi Pelayanan

b. Dependent Variable: keinginan memiliki npwp

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 16,030, dengan nilai sig (0,000) < α (0,05). Artinya, variabel kebutuhan atas NPWP, kemudahan dalam perpajakan, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus, persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak dan kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel keinginan untuk memiliki NPWP.

9. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis data, diperoleh data yang dapat di jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.506	2.280

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Membayar Pajak ,Sanksi Pajak , Kemudahan Dalam Perpajakan, Kebutuhan MemilikiNPWP, Persepsi Manfaat Pajak, PersepsiKualitas Pelayanan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,506 atau 50,6%. Hal ini membuktikan bahwa variabel dependen yaitu keinginan untuk memiliki NPWP dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari kebutuhan atas NPWP, kemudahan dalam perpajakan, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus, perspesi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak dan kesadaran membayar pajak sebesar 50,6%, sedangkan sisanya sebesar 49,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

F. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa kebutuhan atas NPWP berpengaruh positif terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011) yang

untuk memiliki NPWP. Hal ini mencerminkan bahwa semakin positif faktor kebutuhan Wajib Pajak, maka akan semakin memengaruhi tingginya keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP. Dalam penelitian ini kebutuhan dalam memiliki NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi Wajib Pajak sendiri harus berkaitan dengan manfaat memiliki NPWP (Priantara dan Supriyadi, 2011). Adanya beberapa manfaat dalam memiliki NPWP yang dapat dinikmati Wajib Pajak, maka akan timbul keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.

Hasil penelitian hipotesis kedua menyatakan bahwa kemudahan dalam perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan memiliki NPWP. Hal ini mencerminkan bahwa tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang kemudahan dalam perpajakan, seperti cara mendapatkan dan menghapus NPWP dan cara menggunakan pelayanan perpajakan seperti *on line payment*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*. Masih banyak Wajib Pajak yang hanya mengerti kewajiban membayar pajaknya tanpa mengetahui hak-hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap keinginan memiliki NPWP. Hal ini sejalan dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak tidak membuat Wajib Pajak ingin memiliki NPWP. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasar

Beringharjo mayoritas adalah pedagang, sehingga untuk menimbulkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka pemerintah perlu mengetahui hal-hal yang menjadi keinginan maupun harapan para Wajib Pajak. Penelitian Rosita (2012) juga menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap keinginan memiliki NPWP. Hal ini sejalan dengan penelitian Aryobimo (2012) yang menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Anggraini (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa persepsi tentang petugas pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan persepsi yang positif menunjukkan aparat perpajakan mampu memberikan kepuasan pelayanan bagi Wajib Pajak, dan juga akan menimbulkan keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP serta menimbulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban peprajakannya.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Hal ini sesuai dengan penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Manfaat pajak berkaitan dengan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, yaitu fungsi pajak

pengeluarannya (Mardiasmo, 2009). Banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa dana pajak tidak tersalurkan dengan baik, dibuktikan dengan masih banyaknya fasilitas dan sarana umum yang pembangunannya belum terealisasi dengan baik, sehingga keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP masih sangat kecil karena dengan memiliki NPWP tentu mereka harus membayar pajak lebih besar.

Hasil pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk memiliki NPWP. Hal ini sejalan dengan penelitian Novitasari (2007) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak menimbulkan ketidakinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, khususnya pedagang yang memiliki pendapatan per tahun kurang dari 100 juta. Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara, dibuktikan dengan banyaknya korupsi yang

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pedagang yang berada di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta mengenai keinginan untuk memiliki NPWP, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis satu (H_1) diterima. Hal tersebut berarti bahwa kebutuhan atas NPWP berpengaruh positif terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Kebutuhan dalam memiliki NPWP berkaitan dengan manfaat memiliki NPWP. Wajib Pajak menganggap bahwa dengan memiliki NPWP akan senantiasa memperoleh manfaat setelah memiliki NPWP. Keinginan memiliki NPWP akan timbul jika Wajib Pajak mengetahui adanya beberapa manfaat yang diperoleh setelah memiliki NPWP. Dengan memiliki NPWP senantiasa kepatuhan dalam perpajakan pun juga akan terwujud.
2. Hipotesis dua (H_2) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kemudahan dalam perpajakan tidak berpengaruh terhadap keinginan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Pedagang atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Pasar Beringharjo menganggap bahwa kemudahan dalam perpajakan hanya akan dirasakan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Tidak semua pedagang di Pasar Beringharjo yang memiliki NPWP, sehingga tidak semua pedagang yang mengetahui kemudahan dalam perpajakan seperti kemudahan dalam mendapatkan dan